Kemiskinan dan Daya Saing Indonesia: Analisis Keterkaitan Antara Standar Kemiskinan dengan Posisi Indonesia di Pasar Global

**Diah Ayu Wulandari
Helga Yohana Simatupang**

*Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Indonesia*

*e-mail: diahayu.fisip@upnjatim.ac.id
helgayohana.fisip@upnjatim.ac.id*

ABSTRACT

Poverty is not only a domestic problem in the context of globalization and worldwide economic integration, but it also directly affects a nation's standing on the map of global competition. Compared to other Southeast Asian nations, Indonesia has a low national poverty standard, which contributes to the country's ongoing difficult poverty issue. The Indonesian government's poverty standard is frequently criticized for being too low and failing to accurately represent the actual circumstances of the impoverished. This study looks at how national productivity, human resource quality, and human development accomplishments—the primary determinants of the global competitiveness index—are impacted by the setting of the poverty criterion. Using secondary data from national and international institutions and a descriptive qualitative approach, this study concludes that while a low poverty standard may give the appearance of effective poverty alleviation, it actually limits attempts to raise Indonesia's competitiveness in a sustainable way. Therefore, setting a more reasonable poverty standard is necessary before creating a more inclusive and long-lasting national competitiveness.

Keywords: Poverty, Competitiveness, Indonesia, Global Market

ABSTRAK

Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi internasional, isu kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga berdampak langsung terhadap posisi suatu negara dalam peta persaingan global. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks, salah satunya disebabkan oleh standar kemiskinan nasional yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Standar kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sering dikritik karena dinilai terlalu rendah sehingga tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat miskin. Penelitian ini mengkaji bagaimana penetapan standar kemiskinan tersebut memengaruhi capaian pembangunan manusia, kualitas sumber daya manusia, dan produktivitas nasional, yang merupakan komponen utama dalam indeks daya saing global. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data sekunder dari lembaga nasional dan internasional, penelitian ini menemukan bahwa standar kemiskinan yang rendah dapat menciptakan ilusi keberhasilan pengentasan kemiskinan, tetapi justru menghambat upaya peningkatan daya saing Indonesia secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyesuaian standar kemiskinan yang lebih realistis menjadi krusial sebagai langkah awal dalam membangun daya saing nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Daya Saing, Indonesia, Pasar Global

Pendahuluan

Kemiskinan tetap menjadi tantangan struktural di Indonesia meskipun negara ini telah mencatat kemajuan ekonomi selama beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 24,06 juta penduduk miskin di Indonesia pada September 2024, mengalami penurunan sebesar 1,16 juta jiwa dibandingkan Maret 2024 dan 1,84 juta jiwa dibandingkan Maret 2023. Namun demikian, kemiskinan tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kawasan perdesaan dan wilayah timur Indonesia menunjukkan tingkat kemiskinan yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan dan bagian barat Indonesia. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, disparitas ekonomi, serta terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal (BPS, 2024).

Berbagai sektor ekonomi di Indonesia terdampak oleh permasalahan kemiskinan. Produktivitas tenaga kerja, inovasi, dan investasi berpotensi mengalami hambatan akibat tingginya angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan individu dari keluarga miskin memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan, yang pada akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk berinovasi dan memberikan kontribusi secara optimal di tempat kerja. Hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi menjadi masalah serius di Indonesia. Berbagai faktor penyebab, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, dan terbatasnya pilihan pekerjaan, serta kebijakan pemerintah yang tampaknya kurang berpihak pada masyarakat, sering kali menjadi penyebab masalah pengangguran (Ananda et al, 2025). Selain itu, kemiskinan juga menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat aliran investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Akibatnya, perusahaan menjadi enggan untuk menanamkan modal di negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga Indonesia berisiko kehilangan daya saingnya di tingkat global. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Di sisi lain, daya saing merupakan faktor kunci bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam rangka berpartisipasi secara efektif di pasar global. Dalam konteks globalisasi yang semakin dinamis, negara-negara dituntut untuk mampu menarik investasi internasional, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja. Daya saing yang kuat memungkinkan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, serta menyesuaikan diri dengan tren pasar global. Daya saing juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negara dengan tingkat daya saing tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global. Dalam konteks Indonesia, peningkatan daya saing dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, seperti pertanian atau sumber daya alam, dan mendorong diversifikasi ekonomi (Dharma, 2023).

Lebih lanjut, daya saing yang kuat juga menjadi faktor penarik bagi investor asing. Ketika suatu negara mampu menunjukkan kapasitasnya dalam bersaing di pasar global, kepercayaan investor untuk menanamkan modal akan meningkat. Hal ini tidak hanya membawa masuk modal, tetapi juga teknologi baru dan pengetahuan yang dapat memperkuat basis industri lokal. Dengan demikian, peningkatan daya saing Indonesia di pasar global tidak hanya menuntut perbaikan indikator ekonomi semata, tetapi juga pembangunan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pengentasan kemiskinan menjadi langkah awal yang esensial untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa peningkatan daya saing, upaya

pengentasan kemiskinan berisiko tidak menghasilkan capaian yang optimal dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan.

Memahami keterkaitan antara standar kemiskinan dan daya saing Indonesia di pasar global merupakan hal yang krusial dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga secara struktural melemahkan kapasitas Indonesia untuk bersaing di tingkat global. Ketika standar kemiskinan ditetapkan terlalu rendah, banyak warga miskin tidak teridentifikasi secara akurat. Akibatnya, mereka tidak memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, program pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Padahal, dalam era yang sangat kompetitif saat ini, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu penentu utama posisi suatu negara dalam rantai nilai global.

Sayangnya, masih sedikit penelitian yang secara eksplisit membahas keterkaitan antara standar kemiskinan dan daya saing Indonesia di pasar global. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas isu kemiskinan secara sektoral atau lokal. Sementara itu, kajian mengenai daya saing nasional lebih banyak berfokus pada aspek makro ekonomi seperti infrastruktur, stabilitas kebijakan, atau investasi. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis terhadap standar kemiskinan dan dampaknya terhadap daya saing Indonesia di tingkat global. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan pembangunan, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang strategis dalam mengatasi permasalahan kemiskinan guna mendorong peningkatan daya saing Indonesia.

Indonesia saat ini menempati posisi strategis di pasar global maupun regional, khususnya di kawasan ASEAN. Berdasarkan World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 yang dirilis oleh International Institute for Management Development (IMD), Indonesia berhasil naik ke peringkat ke-27 dunia dan menempati posisi ketiga sebagai negara paling kompetitif di Asia Tenggara, setelah Singapura dan Thailand. Meskipun demikian, dalam rantai nilai global (Global Value Chain/GVC), Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah, seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang mencapai 70% dari total ekspor sawit. Selain itu, tekanan global terkait sertifikasi keberlanjutan dan komitmen penurunan emisi karbon turut mempengaruhi daya saing produk nasional (BKPM, 2024).

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu di atas 9%. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan mereka hingga di bawah 7%, dan Thailand berada pada kisaran 8,2%. Dalam aspek daya saing, Indonesia menunjukkan keunggulan dalam efisiensi bisnis dan ketersediaan tenaga kerja, dengan menempati peringkat ke-14 untuk efisiensi bisnis dan peringkat ke-2 untuk ketersediaan tenaga kerja. Namun demikian, Indonesia masih tertinggal dalam hal infrastruktur jika dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Sementara itu, Vietnam, meskipun memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, masih menghadapi kendala birokrasi dan transparansi yang berdampak pada daya saing secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar, tantangan struktural tetap perlu diatasi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan daya saing secara berkelanjutan (BKPM, 2024).

Peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di pasar global sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan terletak pada upaya modernisasi infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pelatihan teknis serta memperkuat konektivitas logistik nasional guna mendukung integrasi Indonesia ke dalam rantai nilai global. Selain itu, kerja sama regional dengan negara-negara

ASEAN, seperti Malaysia dalam penelitian dan pengembangan produk turunan kelapa sawit, serta dengan Thailand dalam pengembangan kendaraan listrik, dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional. Dengan strategi yang tepat, Indonesia memiliki potensi tidak hanya untuk meningkatkan daya saing globalnya, tetapi juga secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan dalam dekade mendatang (BKPM, 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif yang bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara standar kemiskinan nasional dengan daya saing Indonesia di pasar global. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan mengandalkan data primer dan sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen resmi, laporan lembaga pemerintah dan internasional, serta publikasi ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), International Institute for Management Development (IMD), Bank Dunia, World Economic Forum (WEF), serta dokumen kebijakan dari Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi keterkaitan konseptual antara standar kemiskinan dan faktor-faktor penentu daya saing nasional, serta analisis komparatif untuk membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Untuk menjamin validitas data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai lembaga kredibel, serta menggunakan pendekatan logika argumentatif dalam menarik kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak struktural standar kemiskinan terhadap posisi daya saing Indonesia dalam rantai nilai global, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan strategis.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan konseptual dan empiris antara dua variabel utama, yakni standar kemiskinan dan daya saing nasional. Standar kemiskinan dalam konteks Indonesia tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan per kapita, tetapi juga mempertimbangkan dimensi multidimensi seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu mengungkap dimensi struktural dan kebijakan yang seringkali tidak tergambarkan secara utuh melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menempatkan data sebagai dasar argumentasi analitis, bukan sekadar sebagai objek statistik.

Pemilihan data primer dan sekunder sebagai sumber data didasarkan pada pertimbangan bahwa banyak indikator relevan telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh lembaga resmi baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan data yang bersifat longitudinal sehingga mampu menggambarkan tren dan dinamika perubahan baik dalam standar kemiskinan maupun peringkat daya saing Indonesia dari waktu ke waktu. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan telaah terhadap laporan tahunan, indeks internasional, serta kebijakan pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap variabel yang diteliti.

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga menggunakan teknik perbandingan regional dengan menyoroti negara-negara ASEAN yang memiliki karakteristik ekonomi serupa namun menunjukkan capaian berbeda dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing. Pendekatan komparatif ini memberikan ruang untuk melihat praktik kebijakan yang efektif di negara lain dan bagaimana hal tersebut dapat diadopsi

atau disesuaikan dalam konteks Indonesia. Selain itu, perbandingan ini juga membantu untuk menilai sejauh mana posisi daya saing Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal seperti ketepatan standar kemiskinan dan kebijakan domestik.

Sebagai pelengkap, analisis dalam penelitian ini diarahkan pada pemahaman atas *causal loop* atau lingkaran sebab akibat antara kemiskinan dan daya saing. Ketika standar kemiskinan terlalu rendah, sejumlah besar penduduk miskin tidak tercakup dalam intervensi kebijakan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM yang rendah akan membatasi kapasitas produktif nasional dan pada gilirannya menurunkan daya saing di pasar global. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga berupaya membangun kerangka hubungan kausal yang dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan.

Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni Competitive Advantage of Nations Theory oleh Michael Porter. Teori tersebut sangat tepat digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan secara sistematis bagaimana standar kemiskinan suatu negara dapat mempengaruhi daya saingnya di pasar global. Dalam *diamond model*-nya, Porter menekankan pentingnya kualitas faktor produksi seperti sumber daya manusia yang terdidik, sehat, dan inovatif. Ketika standar kemiskinan suatu negara masih rendah, misalnya melalui batas garis kemiskinan yang terlalu minimal, maka banyak masyarakat yang secara de facto hidup dalam keterbatasan, namun tidak terakomodasi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Hal ini berdampak pada rendahnya akses terhadap pendidikan, teknologi, dan layanan kesehatan yang berkualitas, sehingga menurunkan kapasitas tenaga kerja dan produktivitas nasional secara keseluruhan (Kholil, 2021).

Lebih lanjut, standar kemiskinan yang belum sejalan dengan standar global juga mencerminkan kurangnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi kompetisi global, baik dari sisi kualitas SDM, inovasi industri, maupun lingkungan usaha. Teori Porter membantu menjelaskan bahwa daya saing global tidak hanya bergantung pada biaya produksi murah atau sumber daya alam, tetapi juga pada kapabilitas domestik yang dibentuk oleh kebijakan strategis dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menguraikan bagaimana peningkatan standar kemiskinan yang mencakup definisi yang lebih inklusif dan kebijakan pembangunan manusia yang lebih progresif dapat menjadi salah satu prasyarat untuk membangun keunggulan kompetitif Indonesia dalam sistem ekonomi global yang semakin kompleks.

Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Standar Kemiskinan Indonesia dengan Standar Kemiskinan Global dan Implikasinya terhadap Daya Saing

Pada awal April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia, atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Perbedaan angka ini memang terlihat cukup besar, namun penting untuk dipahami secara bijak bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Perbedaan muncul disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda.

Kemiskinan dan Daya Saing Indonesia: Analisis Keterkaitan Antara Standar Kemiskinan dengan Posisi Indonesia di Pasar Global

Bank Dunia memiliki 3 pendekatan atau standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara, yaitu: international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem (US\$ 2,15 per kapita per hari), US\$3,65 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income), dan US\$ 6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income). Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US\$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US\$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03.

Angka kemiskinan Indonesia sebesar 60,3 persen, diperoleh dari estimasi tingkat kemiskinan dengan menggunakan standar sebesar US\$6,85 PPP yang disusun berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas, bukan berdasarkan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik. Bank Dunia juga menyarankan agar tiap negara menghitung garis kemiskinan nasional (National Poverty Line) masing-masing yang disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara.

Walaupun Indonesia saat ini berada pada klasifikasi negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country/UMIC) dengan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar US\$4.870 pada tahun 2023, namun perlu diperhatikan bahwa posisi Indonesia baru naik kelas ke kategori UMIC dan hanya sedikit di atas batas bawah kategori UMIC, yang range nilainya cukup lebar, yaitu antara US\$4.516- US\$14.005. Sehingga, bila standar kemiskinan global Bank Dunia diterapkan, akan menghasilkan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi.

BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Tahun 2024, Susenas dilaksanakan pada bulan Maret dengan cakupan 345.000 rumah tangga di seluruh Indonesia, dan pada bulan September dengan cakupan 76.310 rumah tangga. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif.

Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan. Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp595.242 per bulan. Namun, perlu diperhatikan, konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per orang. Rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah Rp2.803.590 per bulan. Garis kemiskinan berbeda untuk

setiap provinsi, sebab garis kemiskinan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin untuk setiap provinsi berbeda. Sebagai contoh, garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta mencapai Rp4.238.886, di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp3.102.215, dan di Lampung sebesar Rp2.821.375. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan tingkat harga, standar hidup, dan pola konsumsi di setiap daerah.

Dalam membaca angka garis kemiskinan sangat diperlukan kehati-hatian. Garis kemiskinan adalah angka rata-rata yang tidak memperhitungkan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, atau jenis pekerjaan. Secara mikro, angka ini tidak bisa langsung diartikan sebagai batas pengeluaran orang per orang. Sebagai contoh, di DKI Jakarta, garis kemiskinan per kapita pada September 2024 adalah Rp846.085 per bulan. Jika ada satu rumah tangga dengan lima anggota (ayah, ibu, dan tiga balita) maka tidak tepat jika diasumsikan bahwa kebutuhan atau pengeluaran ayah sama dengan balita. Karena konsumsi terjadi dalam satu rumah tangga, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat garis kemiskinan rumah tangga. Dalam kasus ini, garis kemiskinan rumah tangga tersebut adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka inilah yang lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut.

Dengan memahami konsep garis kemiskinan yang benar, maka kemiskinan tidak dapat diterjemahkan sebagai pendapatan per orang, dan bahkan tidak bisa diartikan sebagai gaji 20 ribu/hari bukan orang miskin. Terakhir, perlu dipahami pula bahwa penduduk yang berada di atas garis kemiskinan (GK) belum tentu otomatis tergolong sejahtera atau kaya. Di atas kelompok miskin, terdapat kelompok rentan miskin (1,0-1,5 x GK), kelompok menuju kelas menengah (1,5-3,5 GK), kelas menengah (3,5-17 x GK), dan kelas atas (17 x GK). Kondisi per September 2024, persentase kelompok miskin adalah 8,57 persen (24,06 juta jiwa), kelompok rentan miskin adalah 24,42 persen (68,51 juta jiwa); kelompok menuju kelas menengah 49,29 persen (138,31 juta jiwa), kelas menengah 17,25 persen (48,41 juta jiwa), dan kelas atas 0,46 persen (1,29 juta jiwa).

Tabel 1. Perbandingan Utama Kemiskinan Menurut BPS, World Bank, dan UNDP
(dianalisis dari berbagai sumber)

Aspek	Standar Nasional (BPS)	World Bank (\$3.65 PPP)	UNDP - MPI
Jenis Ukuran	Pengeluaran (moneter)	Pendapatan berbasis PPP	Multidimensi
Ambang Minimum	± Rp 550.000/bulan	± Rp 1,7 - 1,9 juta /bulan	Tidak spesifik nilai Rupiah
Dimensi yang diukur	Makanan dan non-makanan	Daya beli minimum	Kesehatan, pendidikan, standar hidup
Tujuan	Profil statistik domestik	Perbandingan internasional	Diagnosis deprivasi struktural
Kelemahan	Terlalu rendah, tidak reflektif	Belum menyentuh aspek non-moneter	Rumit untuk dihitung dan diimplementasi

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa standar nasional Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan standar global, sehingga bisa menutupi tingkat kemiskinan sesungguhnya bila hanya dilihat dari data BPS. Mengacu pada standar World Bank dan UNDP, jumlah penduduk miskin di Indonesia jauh lebih besar jika ukuran diperluas ke pendapatan menengah bawah dan dimensi multidimensi. Dalam konteks daya saing global, kemiskinan yang dilihat secara sempit (moneter saja) tidak cukup, karena produktivitas dan kapasitas manusia sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek non-moneter yang diakomodasi dalam MPI.

Kemiskinan di Indonesia dan Keterbatasan Akses terhadap Teknologi dan Informasi

Kemiskinan tidak hanya merupakan permasalahan dari segi ekonomi saja tetapi merupakan permasalahan yang kompleks, yaitu dari segi budaya, sosial, psikologi, dan geografi. Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya akses informasi pada masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Informasi memungkinkan seseorang untuk mengembangkan ide, mendapatkan peluang-peluang baru, dan mendapat pembelajaran dari orang lain. Pemerataan pembangunan hanya efektif jika dilakukan seiring dengan pemerataan informasi dan komunikasi (Widiastuti dalam Khoirunnisa dan Budiarti, 2020). Masyarakat dengan ekonomi kurang mampu memiliki keterbatasan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat terkait hal-hal yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Masyarakat tersebut cenderung terlambat mengetahui informasi ketersediaan peluang usaha yang sebenarnya bisa dilakukan jika mendapatkan informasi lebih cepat.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan struktural yang kompleks, terutama ketika dikaitkan dengan keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi. Salah satu akar persoalannya terletak pada standar kemiskinan nasional yang dinilai terlalu rendah dan tidak merefleksikan kondisi riil biaya hidup masyarakat. Standar tersebut hanya menghitung kebutuhan dasar secara minimal, sehingga banyak masyarakat kelas bawah yang hidup dalam kondisi rentan tidak tercatat sebagai penduduk miskin secara administratif. Akibatnya, mereka tidak termasuk dalam target penerima bantuan sosial atau program pengentasan kemiskinan dari pemerintah, meskipun secara ekonomi mereka mengalami kesulitan yang signifikan.

Keterbatasan ini berdampak langsung pada akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber daya penting, termasuk teknologi dan informasi yang semakin menentukan keberhasilan dalam ekonomi digital dan global saat ini. Tanpa dukungan kebijakan yang inklusif, kelompok ini semakin terpinggirkan dari transformasi digital, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kewirausahaan. Ketimpangan ini memperlebar jurang antara mereka yang mampu mengakses peluang berbasis teknologi dan mereka yang tidak. Pada akhirnya, rendahnya standar kemiskinan berkontribusi terhadap siklus eksklusivitas sosial yang menghambat produktivitas nasional dan memperlemah daya saing Indonesia di pasar global yang kini sangat ditentukan oleh kemampuan berinovasi dan mengadopsi teknologi baru.

Oleh karena itu, reformulasi standar kemiskinan menjadi lebih realistis dan sesuai dengan konteks sosial-ekonomi Indonesia saat ini sangatlah penting. Hal ini tidak hanya akan memperluas jangkauan kebijakan sosial, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat miskin terhadap peluang peningkatan kapasitas teknologi, dan informasi. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan dapat diarahkan tidak hanya pada aspek kesejahteraan jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan daya saing jangka panjang melalui pemberdayaan yang berbasis pengetahuan dan teknologi.

Akses terhadap teknologi dan informasi memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Seperti yang disampaikan oleh

Fernández-Portillo et al. (2020), pemanfaatan teknologi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan usaha, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Sementara itu, Asongu et al. (2021) menekankan bahwa teknologi juga memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan informasi pasar, yang secara langsung memperkuat keterampilan tenaga kerja dan memperluas peluang kerja. Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai pengungkit transformasi sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Namun demikian, rendahnya standar kemiskinan yang diterapkan secara nasional menyebabkan banyak individu miskin tidak teridentifikasi sebagai penerima manfaat program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Akibatnya, akses mereka terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, serta infrastruktur digital menjadi sangat terbatas. Ketimpangan ini tidak hanya memperdalam jurang sosial-ekonomi, tetapi juga menutup peluang bagi kelompok miskin untuk berpartisipasi dalam proses inovasi dan ekonomi digital. Padahal, dalam dunia yang semakin terdigitalisasi dan terhubung secara global, keterlibatan aktif masyarakat di sektor berbasis pengetahuan menjadi krusial dalam memperkuat daya saing suatu negara.

Dalam perspektif teori *Competitive Advantage of Nations* yang dikembangkan oleh Michael Porter, elemen seperti kualitas sumber daya manusia, kemampuan inovasi, dan akses terhadap teknologi merupakan bagian penting dari faktor pendukung keunggulan kompetitif suatu negara. Ketika kelompok masyarakat miskin tidak mendapatkan akses terhadap faktor-faktor tersebut akibat keterbatasan standar kemiskinan yang tidak akurat, maka kapasitas nasional dalam membangun industri yang tangguh dan kompetitif menjadi terganggu. Oleh karena itu, reformasi standar kemiskinan yang lebih realistis dan inklusif sangat diperlukan, agar kebijakan pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat posisi daya saingnya dalam ekonomi global melalui pemberdayaan teknologi yang merata dan berkeadilan.

Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Kerja Sama Internasional dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Penguatan Daya Saing Global Indonesia

Temuan studi ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang secara eksplisit menargetkan penanggulangan kemiskinan tidak hanya merupakan instrumen kesejahteraan sosial, tetapi juga merupakan landasan penting untuk meningkatkan daya saing nasional. Kemiskinan yang tinggi berdampak langsung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan akses yang tidak merata terhadap peluang ekonomi. Dengan demikian, reformasi kebijakan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan inovasi menjadi sangat penting.

Pendekatan ini konsisten dengan kerangka Model Berlian Porter, khususnya di sektor industri terkait dan pendukung, di mana kemampuan industri nasional untuk tumbuh dan berinovasi sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kesiapan sumber daya dalam negeri. Reformasi kebijakan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan inovasi menjadi sangat penting mengingat pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan tenaga kerja, sementara sistem kesehatan yang merata akan memastikan produktivitas yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan akan menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung industri-industri strategis untuk dapat bersaing di pasar regional dan global.

Kualitas dan kesiapan sumber daya dalam negeri dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang tepat guna untuk bisa mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan ekonomi dan industri nasional. Peningkatan standar kemiskinan juga

Kemiskinan dan Daya Saing Indonesia: Analisis Keterkaitan Antara Standar Kemiskinan dengan Posisi Indonesia di Pasar Global

mendesak diperlukan guna menunjang kesiapan dan ketahanan sumber daya manusia. Hal tersebut dikarenakan ekonomi yang cukup menjadi salah satu faktor penting terkait kualitas sumber daya manusia. Standar kemiskinan yang sesuai mendorong pertumbuhan sumber daya manusia agar bisa bersaing dalam level nasional dan global. Peningkatan standar kemiskinan nasional dilaksanakan agar selaras dengan standar internasional, yang tidak hanya mempertimbangkan pendapatan minimum, tetapi juga dimensi kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Jika standar kemiskinan di Indonesia sesuai dengan standar internasional, negara-negara akan termotivasi untuk lebih banyak berinvestasi di sektor-sektor fundamental.

Selain itu, temuan dalam studi ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan ke dalam strategi-strategi pembangunan ekonomi nasional. Melalui sinergi kebijakan antara sektor sosial dan sektor industri, Indonesia dapat memperkuat kapasitas domestiknya, menciptakan iklim investasi yang lebih stabil, dan mempercepat transformasi struktural ekonominya. Dengan kebijakan-kebijakan yang terarah dan inklusif, peningkatan daya saing nasional tidak hanya menjadi tujuan ekonomi, tetapi juga merupakan hasil dari pembangunan sosial yang merata dan berkelanjutan.

Selain melalui kebijakan yang tepat guna, Indonesia juga perlu menjalin kerja sama internasional yang komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan daya saing Indonesia di level nasional dan global. Kerja sama internasional merupakan alat strategis bagi Indonesia dalam upayanya meningkatkan daya saing nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera. Indonesia dapat mengakses sumber daya yang relevan seperti teknologi mutakhir, modal investasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan akses yang lebih luas ke pasar global melalui kemitraan dengan lembaga multilateral, negara sahabat, dan aktor non-negara seperti organisasi internasional dan sektor swasta global. Jenis kolaborasi ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik, yang sangat penting dalam mempromosikan pembangunan yang inklusif dan produktif.

Menurut Model Berlian Porter, kolaborasi internasional dapat meningkatkan strategi, struktur, dan persaingan entitas ekonomi, khususnya terkait bagaimana lembaga usaha nasional menetapkan strategi bisnis, menanggapi tantangan kompetitif, dan bertransformasi untuk memenuhi standar internasional. Akses ke metode dan teknologi manajemen global memungkinkan pelaku ekonomi Indonesia untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan inovasi. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas nasional dan ketahanan industri dalam negeri di pasar yang semakin kompetitif.

Selain itu, kerja sama internasional dapat membantu Indonesia mengembangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif berdasarkan pengalaman global. Misalnya, program bantuan teknis untuk pendidikan kejuruan, pelatihan tenaga kerja, dan reformasi sistem jaminan sosial akan meningkatkan keterampilan dan ketahanan ekonomi masyarakat miskin. Ketika standar kemiskinan ditingkatkan dan masyarakat miskin memiliki akses yang lebih besar terhadap peluang ekonomi, konsumsi domestik dan kapasitas produksi akan meningkat, yang pada gilirannya memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan dan investasi internasional. Oleh karena itu, kerja sama internasional tidak hanya mendukung tetapi juga transformatif dalam mendorong daya saing Indonesia yang berkelanjutan.

Kerjasama internasional untuk mengentaskan kemiskinan bukan hanya kerjasama dengan aktor negara, melainkan dengan aktor non-negara. Kolaborasi antara aktor negara dan

non-negara yang melibatkan komitmen berbagai pihak mendorong penyelesaian masalah secara lebih efektif dan komunikatif. Kerjasama dengan aktor negara dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang memerlukan kewenangan di level pusat. Sementara itu, kerjasama dengan sektor swasta diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan oleh negara (Wulandari, 2023). Dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki oleh aktor negara, didukung oleh kapabilitas aktor non-negara dari berbagai latar belakang dan keahlian akan menjadi kombinasi yang efektif untuk menyelesaikan masalah.

Salah satu contoh nyata kerja sama internasional yang signifikan meningkatkan daya saing Indonesia di lingkup global adalah kerja sama Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam program pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan vokasi. Melalui proyek Polytechnic Education Development Project, JICA memberikan dukungan teknis dan pendanaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia, termasuk pengembangan kurikulum berbasis industri dan pelatihan bagi dosen dan pengelola pendidikan tinggi vokasi. Proyek ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri akan tenaga kerja terampil yang siap bersaing secara internasional. Di sisi lain, Indonesia juga bekerja sama dengan Bank Dunia dalam proyek-proyek besar seperti Indonesia Human Capital Development Program (IHCD) dan National Slum Upgrading Program (NSUP). Proyek-proyek ini tidak hanya menargetkan pengentasan kemiskinan dalam hal peningkatan infrastruktur perumahan dan layanan dasar, tetapi juga menekankan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan sebagai landasan bagi produktivitas jangka panjang. Melalui pendekatan ini, kerja sama internasional membantu menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang lebih kondusif untuk pertumbuhan yang inklusif.

Kolaborasi tersebut telah memberikan kontribusi substansial dalam meningkatkan komponen utama Indeks Daya Saing Global (GCI), khususnya di bidang sumber daya manusia, infrastruktur, dan kemampuan inovasi. Misalnya, kolaborasi dengan JICA telah meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, menghasilkan tenaga kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan perubahan teknologi. Hal ini secara langsung telah meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja Indonesia dan daya tariknya sebagai lokasi investasi di industri manufaktur dan berbasis teknologi. Selain itu, program Bank Dunia dalam pembangunan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan telah meningkatkan persepsi global terhadap komitmen Indonesia untuk membangun pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berbagai kemitraan internasional yang sedang dan telah dijalin Indonesia menjadikan lembaga-lembaga internasional semakin memandang Indonesia sebagai mitra penting di kawasan, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkomitmen pada reformasi sosial. Hal ini telah meningkatkan kepercayaan investor, memperluas peluang perdagangan, dan memperkuat pengaruh Indonesia di forum-forum internasional seperti G20 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan demikian, kemitraan atau kerja sama internasional telah terbukti lebih dari sekadar sumber dukungan teknis atau keuangan, kerja sama internasional juga merupakan sarana strategis untuk mempercepat transisi daya saing Indonesia dengan mengembangkan kemampuan lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk bisa bersaing di level global.

Kesimpulan dan Saran

Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan keterbatasan akses terhadap teknologi, pendidikan, informasi, serta pelayanan sosial dasar. Salah satu akar permasalahan serius adalah rendahnya standar kemiskinan nasional Indonesia yang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Standar yang sangat rendah ini tidak mampu mengakomodasi kondisi riil masyarakat, sehingga banyak individu dan keluarga miskin tidak terdeteksi secara administratif sebagai golongan miskin. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan bantuan sosial, perlindungan, dan program pemberdayaan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Standar kemiskinan yang tidak realistis ini berdampak langsung pada efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan memperparah ketimpangan sosial. Di tengah transformasi global dan ekonomi digital, masyarakat miskin yang terpinggirkan dari akses terhadap teknologi dan sumber daya ekonomi akan semakin tertinggal. Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah keadilan sosial, tetapi juga menghambat peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.

Dalam perspektif teori Competitive Advantage of Nations dari Michael Porter, kualitas sumber daya manusia adalah kunci bagi produktivitas dan keunggulan kompetitif nasional. Maka, jika Indonesia ingin meningkatkan daya saingnya di pasar global dan membangun ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan, peningkatan standar kemiskinan nasional merupakan langkah mendesak dan strategis. Selain itu, pentingnya akses teknologi informasi harus menjadi prioritas untuk memperluas peluang pendidikan, pekerjaan, dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Akses yang memadai akan memungkinkan mereka untuk tidak tertinggal dalam era digital dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Selanjutnya, sinergi kebijakan ekonomi dalam negeri dengan kerja sama internasional menjadi kunci keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan daya saing global Indonesia. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membuka akses pasar, dan meningkatkan investasi serta transfer teknologi yang mendukung pertumbuhan inklusif. Dengan pendekatan yang holistik dan terpadu tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan secara struktural, tetapi juga memperkokoh posisi strategisnya dalam persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif dan dinamis.

Daftar Pustaka

- Ananda, D., Simatupang, H. Y., & Srifauzi, A. (2025). Trends in Online Gambling and Government's Inability to Achieve Decent Work in Indonesia: What Should We Do?. *PROIROFONIC*, 1(1), 403-412.
- AHA Centre. (2018, September 11). Vol 39-JAPAN ASEAN Integration Fund - AHA Centre - The Column. *AHA Centre - The Column - The AHA Centre News Bulletin*. <https://thecolumn.ahacentre.org/posts/partnership/vol-39-japan-asean-integration-fund/>
- Asongu, S., Amari, M., Jarbou, A., & Mouakhar, K. (2021). ICT dynamics for gender inclusive intermediary education: Minimum poverty and inequality thresholds in developing countries. *Telecommunications Policy*, 45(5), 102125. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102125>

- BKPM. (2024, June 24). *Daya Saing Indonesia Capai Peringkat Terbaik Sepanjang Sejarah*. Ministry of Investment and Downstream Industry. Retrieved April 25, 2025, from <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/daya-saing-indonesia-capai-peringkat-terbaik-sepanjang-sejarah>
- Dharma, O. (2023, June 4). Kemiskinan Global dalam Hubungan Internasional Halaman 1 - Kompasiana.com. *KOMPASIANA*. <https://www.kompasiana.com/osvaldo22/647cbc5808a8b506b37ce3b2/kemiskinan-global-dalam-hubungan-internasional>
- Fernández-Portillo, A., Almodóvar-González, M., & Hernández-Mogollón, R. (2020). Impact of ICT development on economic growth. A study of OECD European union countries. *Technology in Society*, 63, 101420. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101420>
- Indonesia, B. P. S. (2025, January 15). *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>
- Kholil, Q. (2021, October 28). *Globalisasi dan Strategi Kompetisi Korporasi*. Suara Investor. Retrieved May 22, 2025, from <https://www.suarainvestor.com/globalisasi-dan-strategi-kompetisi-korporasi/>
- Ministry of Finance of Indonesia. (2024, September 26). *Wamenkeu Thomas: Pemerintah Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi dalam 10 Tahun Terakhir*. Retrieved January 5, 2025, from <https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Thomas-BPS>
- Mohajan, H. K. (2018). QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES AND RELATED SUBJECTS. *Journal of Economic Development Environment and People*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.26458/jedep.v7i1.571>
- Nisa, K., & Budiarti, W. (2020). PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2012-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 759–768. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.186>
- Ravindran, V. (2019). Data analysis in qualitative research. *Indian Journal of Continuing Nursing Education*, 20(1), 40. https://doi.org/10.4103/ijcn.ijcn_1_19
- Wulandari, D. A. (2023). The effort of state and Non-State actors in ensuring access to primary and secondary education for Indonesian citizens in Singapore. *Global South Review*, 4(1), 8. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.80403>